

## Peran Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Verensyiah Sofyan Adam Duda<sup>a</sup>, Eko Purwanto Mooduto<sup>b</sup>, Meilina Widya Dali<sup>c\*</sup>, Al Fajar<sup>d</sup>, Azizah Maharani Mohama<sup>e</sup>, Alwi Hasni<sup>f</sup>, Abdi Praja Sahrain<sup>g</sup>, Rasya Abdillah Taha<sup>h</sup>, Amelia Dolongseda<sup>i</sup>, Alfi Syahril Ramadhan Machmud<sup>j</sup>, Adly Fairus Montu<sup>k</sup>, Mohamad Alkindi Hernandya Adipu<sup>l</sup>, Brigita Kaela<sup>m</sup>, Sity Fauziah Mokoagow<sup>n</sup>, Hanifa Ramadhani Biludi<sup>o</sup>

*a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o* Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
email: [meilinawdali@ung.ac.id](mailto:meilinawdali@ung.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 18 November 2025

Revised : 15 Desember 2025

Accepted : 24 Desember 2025

**Keywords:**

Indonesian, indictment, high prosecutor's office

**Kata Kunci:**

Bahasa Indonesia, surat dakwaan, kejaksaan tinggi

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of standard Indonesian language usage in the drafting of indictments at the Gorontalo High Prosecutor's Office, particularly in relation to clarity of meaning, structural accuracy, and the effectiveness of legal communication. The research employs a qualitative-descriptive method, with data collected through document analysis of selected indictments, interviews with prosecutors responsible for drafting the indictments, and observation of the indictment preparation process. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to identify patterns of language use and their implications for the quality of legal documents. The findings indicate that the use of standard Indonesian plays a crucial role in ensuring legal certainty, preventing ambiguity, and strengthening juridical argumentation in indictments.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, khususnya terkait kejelasan makna, ketepatan struktur, serta efektivitas komunikasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen terhadap sejumlah surat dakwaan, wawancara dengan jaksa penyusun dakwaan, serta observasi proses penyusunan surat dakwaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk melihat pola penggunaan bahasa dan implikasinya terhadap kualitas dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia baku berperan penting dalam

memastikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas, dan memperkuat argumentasi yuridis dalam surat dakwaan.

## **LATAR BELAKANG**

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, pengembang kebudayaan, serta identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan tinggi dalam perumusan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, dan dokumen resmi lainnya. Bahasa hukum harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan tidak multitafsir, sebab sedikit saja kekeliruan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berakibat pada ketidakpastian hukum.

Dalam ranah hukum, Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan tinggi. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Bahasa Indonesia dalam bidang hukum pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, kejelasan Bahasa ini sangat penting karena surat dakwaan akan menjadi acuan bagi hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan.

Kejaksaan tinggi Gorontalo menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan tidak bermakna ganda, ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana dan kronologi perbuatan dalam dokumen hukum. Dokumen hukum yang dimaksud salah satunya yaitu surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan bentuk resmi perumusan perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang disusun secara cermat dan jelas oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan. Karena surat dakwaan yang tidak jelas, kabur, dan ambigu berpotensi merugikan terdakwa serta bisa menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Keberadaan surat dakwaan bukan sekadar dokumen tetapi merupakan instrument yang menentukan arah proses peradilan, menjaga keseimbangan, serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa yang terstruktur dengan baik, tidak ambigu, dan sesuai dengan aturan Bahasa yang berlaku sangat penting agar semua isi dokumen dipahami dengan tepat oleh semua pihak. Penggunaan Bahasa baku di Kejaksaan Tinggi Gorontalo memastikan surat dakwaan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum, sehingga memberikan kekuatan hukum yang tidak dapat diragukan di hadapan persidangan.

Penelitian ini akan memperdalam pemahaman kita terkait pentingnya peran Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan sehingga kita dapat mengetahui ketentuan-ketentuan peran Bahasa Indonesia baku dalam pembuatan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ini akan menjadi landasan kita dalam pengembangan penggunaan bahasa yang teliti, terang, tegas dan tidak bermakna ganda. Tanpa peran Bahasa Indonesia baku, dakwaan rentan samar dan menyulitkan pembuktian di sidang dan kebebasan melepaskan pembela.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian

dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Tujuan penelitian deskriptif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sedangkan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dari sudut pandang partisipan dalam mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Menurut Sugiyono (2020) di halaman 105, ada empat teknik utama pengumpulan data dalam penelitian, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan), yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Dalam penelitian ini kami melakukan observasi secara langsung di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, kemudian melakukan wawancara dengan informan, serta dokumentasi yang jelas sebagai bukti dan data penelitian yang akurat. Melalui proses ini, peneliti menganalisis penelitian yang telah dilakukan untuk menghasilkan informasi serta Kesimpulan yang akurat dan terstruktur.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi bertujuan untuk memahami bagaimana proses penyusunan dakwaan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan standar penuntutan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai informan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab. Maka dari itu wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab. Untuk memperjelas hasil penelitian maka peneliti menganalisis hasil dari wawancara yang kemudian di susun menjadi subtopik sebagai berikut :

### **1. Penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo**

Penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sangat penting karena merupakan aspek untuk menjamin kepastian hukum dan kejelasan isi dakwaan. Sebagai dokumen resmi yang menentukan arah proses peradilan pidana, surat dakwaan harus disusun dengan pilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang efektif, serta konsistensi istilah hukum agar tidak menimbulkan multitafsir. Jaksa penuntut umum di Kejati Gorontalo umumnya mengikuti standar nasional Kejaksaan RI, seluruh proses surat dakwaan di pantau oleh pusat dalam hal ini Kejaksaan Agung melalui website SIPD RI. Dalam sistem ini, setiap dokumen dan laporan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan konsisten, agar informasi dapat dipahami secara tepat oleh seluruh pihak yang mengaksesnya.

## **2. Konsekuensi hukum jika surat dakwaan tidak disusun menggunakan Bahasa Indonesia baku**

Surat dakwaan yang tidak jelas dan menggunakan istilah yang tidak tepat atau memiliki struktur kalimat yang membingungkan dapat menimbulkan multitafsir sehingga unsur-unsur tindak pidana tidak tergambar dengan tegas. Dalam praktik peradilan, dakwaan yang kabur dapat diajukan keberatan oleh penasihat hukum terdakwa melalui eksepsi. Jika keberatan tersebut diterima hakim, dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan jaksa harus menyusun dakwaan baru. Kondisi ini tidak hanya memperlambat penegakan hukum, tetapi juga dapat melemahkan posisi jaksa penuntut umum karena dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat formal maupun materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di Kejaksaan tinggi Gorontalo terdapat tata cara penyusunan surat dakwaan yang tidak boleh di langgar sehingga dalam proses penyusunan surat dakwaan akan terstruktur dengan akurat dan jelas.

## **3. Faktor penyimpangan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan**

Salah satu faktor utama dalam penyimpangan Bahasa Indonesia baku adalah kurangnya pemahaman atau penguasaan jaksa penuntut umum terhadap kaidah bahasa baku, termasuk ketepatan diksi hukum, struktur kalimat efektif, dan aturan PUEBI. Selain itu, pengaruh bahasa sehari-hari atau dialek daerah, seperti bahasa lokal yang umum digunakan dalam komunikasi di lingkungan Gorontalo, dapat memengaruhi pilihan kata dan gaya bahasa dalam penulisan formal. Faktor lain adalah beban kerja dan tekanan waktu, yang membuat penyusunan dakwaan dilakukan secara cepat sehingga aspek kebahasaan kurang diperhatikan secara detail. Minimnya pelatihan kebahasaan dan pembaruan informasi terkait istilah hukum juga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penggunaan terminologi.

## **4. Perbedaan Bahasa baku dan non-baku memengaruhi validitas dokumen hukum dan konsistensi norma pidana**

Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap validitas dokumen hukum serta konsistensi norma pidana karena bahasa merupakan instrumen utama dalam menyampaikan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dan terukur. Bahasa baku dengan struktur kalimat yang sistematis, pilihan diksi yang tepat, dan kepatuhan pada kaidah ejaan, memastikan bahwa dokumen hukum seperti surat dakwaan tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat melemahkan kekuatan yuridisnya. Sebaliknya, penggunaan bahasa non-baku yang cenderung informal, tidak konsisten, atau bercampur dengan bahasa daerah dapat menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga unsur delik mungkin tampak tidak lengkap ataupun tidak terbukti secara jelas. Kondisi ini dapat memengaruhi penafsiran hakim, membuka peluang eksepsi dari pihak terdakwa, hingga memungkinkan dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, konsistensi penggunaan bahasa baku dalam perumusan norma pidana tidak hanya menjamin validitas formal dokumen hukum, tetapi juga melindungi hak asasi warga negara dari penerapan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap orang dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dihadapi

jika melanggarnya.

## 5. Mekanisme *quality control* di Kejaksaan tinggi Gorontalo

*Quality Control (QC)* atau Pengendalian Mutu adalah proses sistematis untuk memeriksa, menguji, dan memantau produk atau layanan agar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Berdasarkan data wawancara, mekanisme *quality control* dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkonfirmasi berjalan secara hierarkis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses validasi ini dilaksanakan berjenjang, dimulai dari penyusunan draf oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), pemeriksaan substansi oleh pejabat struktural, hingga persetujuan akhir oleh Asisten Tindak Pidana Umum. Selain pemeriksaan naskah, diterapkan pula mekanisme gelar perkara (*expose*) sebagai instrumen untuk menguji konstruksi hukum sekaligus memastikan ketepatan penggunaan bahasa agar memenuhi syarat formil dan materiil.

## PENUTUP / KESIMPULAN

Bahasa Indonesia baku memiliki peran penting di Kejaksaan tinggi Gorontalo karena menjadi alat komunikasi resmi yang menjadi kejelasan serta ketepatan dalam berbagai dokumen hukum serta proses penegakan hukum. Penggunaan Bahasa Indonesia baku bukan sekadar formalitas tetapi merupakan bagian dari Upaya menjaga integritas proses hukum sehingga dapat mengurangi potensi ambiguitas dan kesalahan tafsir. Terutama, dalam penyusunan surat dakwaan sebagai dokumen hukum yang menentukan arah suatu proses pengadilan. Surat dakwaan di susun secara jelas, sistematis, dan bebas dari ambiguitas, sehingga setiap delik yang didakwakan dapat dipahami secara tepat oleh hakim, terdakwa, maupun pihak-pihak terkait. Dalam praktik penegakan hukum, ketidaktaatan pada kaidah Bahasa dan penggunaan istilah yang tidak tepat dapat menimbulkan multitafsir. Maka dari itu peran Bahasa Indonesia baku sangat penting dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan tinggi Gorontalo. Dengan demikian peran Bahasa Indonesia baku menjadi instrument utama yang menjamin ketelitian hukum serta kepastian prosedural sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1981.

Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. (2016). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Harahap, M. Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeliono, Anton M., dkk. (2017). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Soepomo, R. (2019). Bahasa Hukum Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.

Salsabila, J., Indraswary, A. D., Putri, E. E., Pujawati, S. A., & Seifana, N. (2024). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Kontrak Berbasis Smart Contract. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 51–56. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2455>

Siswanta, A. R. L. (2025). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal de Jure*, 15(1), Article 798. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.798>